

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Transparansi

Teori transparansi telah dibahas oleh berbagai ahli dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu politik, ilmu administrasi publik, dan ilmu hukum. Berikut adalah beberapa pendapat ahli tentang teori transparansi :

James Madison, salah satu Bapak Pendiri Amerika Serikat, menyatakan bahwa transparansi adalah salah satu pilar penting dari pemerintahan yang demokratis. Ia berpendapat bahwa dengan adanya transparansi, maka masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah dan mencegah terjadinya korupsi. Robert A. Dahl, seorang ahli ilmu politik, menyatakan bahwa transparansi adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif dan akuntabilitas. Ia berpendapat bahwa dengan adanya transparansi, maka pemerintah dapat memahami kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Peter Self, seorang ahli ilmu administrasi publik, menyatakan bahwa transparansi adalah salah satu prinsip penting dari good governance. Ia berpendapat bahwa dengan adanya transparansi, maka pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik. Frank B. Cross, seorang ahli hukum, menyatakan bahwa transparansi adalah hak asasi manusia yang fundamental. Ia berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengetahui informasi yang relevan dengan dirinya, termasuk informasi yang dimiliki oleh pemerintah.

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori transparansi memiliki beberapa dimensi penting, Transparansi didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengetahui informasi yang relevan dengan dirinya. Transparansi diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, di mana masyarakat memiliki peran dalam mengawasi kinerja pemerintah. Transparansi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi, karena memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih baik. Transparansi adalah hak asasi manusia yang fundamental.

Teori transparansi memiliki beberapa manfaat penting, yaitu: Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah dan pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pihak-pihak lain. Transparansi dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

2.2 Program Sibermata Desa dalam Mewujudkan Transparansi

Partisipasi masyarakat dalam program Sibermata Desa dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain Musyawarah desa. Musyawarah desa adalah forum musyawarah tahunan yang dihadiri oleh seluruh warga desa. Dalam musyawarah desa, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran tentang program Sibermata Desa. Melakukan kegiatan kerja bakti gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat desa. Kerja bakti dapat dilakukan untuk membantu memasang infrastruktur pendukung program Sibermata Desa, seperti jaringan internet dan perangkat computer. Survei dapat dilakukan untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang program Sibermata Desa. Survei dapat dilakukan oleh pemerintah desa atau lembaga independen. Dalam sebuah desa di Jawa Tengah, masyarakat berpartisipasi dalam

musyawarah desa untuk membahas program Sibermata Desa. Masyarakat memberikan masukan tentang perlunya meningkatkan akses internet di desa tersebut. Dalam sebuah desa di Kalimantan Barat, masyarakat berpartisipasi dalam kerja bakti untuk memasang jaringan internet di desa tersebut. Masyarakat bergotong royong untuk menggali tanah, memasang kabel, dan memasang perangkat komputer. Dalam sebuah desa di Sumatra Utara, masyarakat berpartisipasi dalam survei untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang program Sibermata Desa. Survei tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sangat mendukung program tersebut. Secara umum, partisipasi masyarakat dalam program Sibermata Desa sudah berjalan dengan baik. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Penyuluhan tentang program Sibermata Desa perlu dilakukan secara lebih intensif kepada masyarakat. Hal ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program tersebut. Fasilitas pendukung partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan. Hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam berpartisipasi dalam program tersebut. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, diharapkan program Sibermata Desa dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa.

Akuntabilitas program Sibermata Desa adalah hal yang penting untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban atas kinerja suatu program. Dalam hal ini, akuntabilitas program Sibermata Desa dapat diwujudkan melalui beberapa hal, Pemantauan dan evaluasi program. Pemantauan dan evaluasi program dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut telah mencapai tujuannya. Pemantauan dilakukan secara rutin, sedangkan evaluasi dilakukan secara berkala. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain pemerintah, masyarakat, dan lembaga independen. Informasi tentang program Sibermata Desa harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Informasi tersebut meliputi tujuan program, sasaran program, anggaran program, dan hasil pelaksanaan program. Transparansi informasi dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain media massa, situs web, dan media sosial. Masyarakat harus dilibatkan dalam pelaksanaan program Sibermata Desa. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain melalui musyawarah desa, kerja bakti, dan survei. Partisipasi masyarakat dapat membantu meningkatkan akuntabilitas program.